

# CORONA, DESA, DAN NEGARA

Bagaimana desa menyelematkan Indonesia  
di era pandemi Covid-19



Puthut EA

Puthut EA

**CORONA,  
DESA,  
DAN NEGARA**

Bagaimana desa menyelamatkan Indonesia  
di era pandemi Covid-19

**B**erulang kali, desa-desa di Indonesia ikut ambil bagian sebagai pemecah masalah dari setiap krisis dan perlambatan ekonomi yang terjadi di negeri ini. Ironisnya, dalam proses pembangunan di negeri ini, sebetulnya yang sering terjadi justru desa terus-menerus diperas oleh negara. Daya dukung alamnya dirusak, orang-orang terbaiknya dicabut untuk ikut menggerakkan roda ekonomi kota lewat proses sekolah. Hanya dalam waktu kurang lebih 25 tahun, jumlah penduduk desa di seluruh negeri ini telah menyusut sebanyak 10%, dari 54,1% (1995) menjadi 51,2% (2010), lalu 47,7% (2015), dan kini bersisa 44.3% (2020). Bahkan, BPS memperkirakan bahwa 15 tahun lagi, pada tahun 2035 nanti, hanya akan bersisa sepertiga (33,4%) saja rakyat Indonesia yang masih mukim di desa-desa. Singkatnya, penduduk perdesaan kita menjadi jauh lebih sedikit dibanding warga kerumun kota. Sehingga, ungkapan yang selama ini sering diulang-ulang bahwa sebagian besar (mayoritas) penduduk Indonesia hidup di perdesaan, jelas sudah tidak relevan lagi.

Bahkan orang desa terdidik dengan dukungan desa, yang kemudian tumbuh menjadi kelas menengah kota pun sering menjadi bagian penting dari proses sentralisasi lahan desa kepada orang atau kelompok masyarakat tertentu. Namun ketika krisis dan perlambatan ekonomi terjadi, kota-kota terlihat rapuh untuk menyangga negara. Desa yang terperas sumberdaya alam dan manusianya, kembali harus menopangnya. Cara negara memperlakukan kota sebaiknya harus disetel ulang, dicari gelombang yang pas dan ber-

keadilan. Tapi sebelum menyetel ulang, sebaiknya digeser dulu cara pandang dan paradigma negara dalam melihat apa itu desa dan betapa strategis posisi desa untuk negara agraris sekaligus maritim ini.

Sebetulnya, untuk melihat bagaimana ironisnya hubungan antara desa, kota, dan negara, bisa kita lihat lewat film-film perjuangan. Desa menjadi basis untuk melawan kekuatan kolonial. Perang gerilya sebagai salah satu strategi ampuh melawan musuh karena kalah dalam persenjataan, hanya bisa terjadi jika didukung oleh kekuatan desa. Secara ekonomi dan politik, para pejuang kita dihidupi dan dilindungi oleh desa. Begitu tentara kolonial tahu, maka desa-desa diserbu. Para pejuang pergi ke hutan, berkelit dari kejaran musuh. Di saat seperti itulah, desa-desa dibuat porak-poranda oleh kelakuan tentara kolonial, bahkan banyak yang dibakar hingga menjadi abu.

Di era ketika Indonesia memasuki babak pembangunan, kira-kira beginilah yang sering terjadi. Anak-anak desa bersekolah dengan hasil perekonomian desa. Ketika mereka sudah terdidik, sebagian besar dari mereka bekerja di kota. Energi mereka diperas di sana. Ketika mereka menikah, bahkan saat akan membeli rumah, kadang menjual aset orangtua mereka di desa. Pada saat seperti inilah, terjadi proses konsentrasi kepemilikan lahan di desa oleh segelintir orang dan kelompok tertentu. Saat mereka kena masalah ekonomi, baik secara personal maupun karena pengaruh eksternal, kembali mereka membenani desa. Ada yang

menitipkan anak-anak mereka ke desa terlebih dulu untuk dirawat orangtua mereka, ada yang istri dan suami yang balik ke desa dulu. Bahkan tak jarang semua pulang ke desa, menitipkan nasib mereka pada desa, jika keadaan pulih, mereka kembali ke kota. Saat mereka sudah menua, pensiun, renta diperas oleh kota, sebagian dari mereka kembali ke desa dalam situasi yang sudah tidak produktif lagi dan kembali menjadi beban desa.

Dari ilustrasi di atas, terlihat betapa timpang dan tidak adilnya relasi antara desa dengan kota. Itu masih belum apa-apa jika kita teruskan lagi. Jika di desa ada sumber mineral yang dipandang punya nilai ekonomis penting, maka ditambanglah hanya dengan perhitungan perekonomian sesaat, tanpa mempedulikan keberlanjutan dan kelestariannya. Orang-orang desa yang berusaha mempertahankan tanah dan perekonomian mereka yang sudah teruji kuat dan berkelanjutan, dipaksa menjual tanah mereka untuk ditambang. Para petani yang semula mandiri secara ekonomi, berubah menjadi tidak produktif karena hanya mengelola lahan yang makin sempit, dan bahkan banyak yang akhirnya menjadi pekerja tambang. Sekian puluh tahun kemudian, ketika mineral di sana habis diangkut, tersisa lubang mennganga. Alam yang rusak. Yang tersisa di sana tinggal rasa putus asa. Orang-orang sudah kehilangan lahan dan kemandirian mereka, alam pun sudah bunyak.

Sialnya, negara tidak pernah melihat hal seperti ini sebagai sebuah persoalan ekonomi dan sosial yang besar. Bahkan

negara kerap hadir sebagai promotor dan beking dari industri ekstraktif yang kerap memeras desa menjadi tak berdaya. Padahal desa itu sendiri, bermakna berdaya dan mandiri. Tapi mereka dilumpuhkan. Alamnya dirusak, sumberdaya manusianya dicabuti. Jika memang Indonesia mendefinisikan negara ini sebagai negara agraris sekaligus maritim, maka jelas sokoguru perekonomiannya adalah desa. Sayangnya, justru perlakuan negara terhadap desa tidak pernah bisa dibilang adil.

Memang, semenjak pemerintahan SBY, lalu dilanjutkan pemerintahan Jokowi, ada dana yang dialirkan di desa. Tentu kebijakan itu patut kita apresiasi. Masalahnya adalah jika daya dukung alam sebagai salah satu modal desa yang penting telah dirusak, konsentrasi lahan ada pada segelintir orang dan kelompok tertentu terus terjadi, sumberdaya manusia terbaiknya terus diangkut ke kota, maka gelontoran uang ke desa bisa tidak maksimal untuk menggerakkan perekonomian desa. Lagipula, apa memang dana sejumlah itu cukup untuk membangun (memperbaiki kembali) desa yang selama ini dirusak oleh sistem perekonomian pengeruk sumberdaya dan perusak lingkungan kehidupan?

Pada tahun 1983, Prof. Sarbini Somawinata (alm.) --salah seorang 'Begawan Ekonomi Indonesia' selain Prof. Soemitro Djojohadikusumo (alm), meskipun mereka berdua sangat sering tidak sependapat dan mengambil posisi berlawanan-- pernah menyatakan bahwa dibutuhkan dana paling sedikit Rp 1 miliar untuk membangun satu desa secara memadai

dan menyeluruh. Itu dinyatakan pada masa di mana nilai tukar rupiah masih di bawah Rp 1.000 (tepatnya Rp 626) per AS\$ 1. Sekarang nilai tukar rupiah mencapai Rp 14.400 per AS\$ 1. Artinya, naik 23 kali lipat. Maka, bertolak dari hitungan Prof. Sarbini, mestinya setiap desa sekarang mendapat alokasi dana desa paling sedikit Rp 23 miliar! Jika kerusakan sumberdaya dan lingkungan kehidupan di pedesaan juga ikut dihitung biaya kerusakan dan pemulihannya (*externality costs*), maka jumlah itu harus ditambahkan lagi sebanyak 6-8 kali lipat menjadi Rp 138 -184 miliar! Dalam kenyataannya, setiap desa kini hanya menerima dana rerata pada kisaran Rp 1 – 2 miliar saja.

## Ketika Pandemi Terjadi

**B**erbeda dengan krisis dan perlambatan ekonomi yang pernah terjadi di negeri ini, krisis kali ini diawali dengan krisis kesehatan yang membawa implikasi pada krisis ekonomi. Sehingga yang terjadi di desa kemudian juga dua hal besar: menjadi penyangga perekonomian sebagaimana yang sudah pernah terjadi, sekaligus penghadang penyebaran pandemi.

Sistem informasi soal pandemi dan berbagai kebijakan menyikapi ini, memang sempit simpang-siur. Dalam hal ini memang bisa dipahami. Karena pandemi ini bersifat mendadak, dan sebelumnya tidak pernah terjadi. Wajar jika

hampir semua negara di seluruh dunia gagap dalam merespons dan menghadapinya. Tapi warga desa, mesti berkuat dengan hal nyata.

Banyak dari keluarga mereka yang akhirnya pulang kampung karena tidak lagi memiliki pekerjaan di kota. Begitu mereka pulang, itu artinya ada dua. Pertama, beban desa makin bertambah. Kedua, desa menjadi teritori persebaran Covid-19. Untuk soal pertama, itu lumrah terjadi, walaupun jelas bedanya. Karena daya dukung desa untuk menerima ‘beban buangan’ dari desa sudah tidak sehebat dulu. Proses pemiskinan desa, industri ekstraktif yang merusak ekosistem dan perekonomian desa, juga sentralisasi kepemilikan lahan, tentu menjadi sebab kenapa desa tidak seberdaya dulu. Dan jika pemerintah tidak berhati-hati, makin lama desa makin tidak berdaya. Kedua, respons desa untuk melindungi warganya dari intaian dan persebaran Covid-19. Reaksi desa di Yogya dan beberapa daerah lain kemudian mirip, semacam *lockdown* ala kampung. Jika istilah ini tidak dipahami dengan baik, tentu bisa berbahaya karena bisa terjadi proses ‘menyalahkan korban’.

Desa merespons dengan cara seperti itu karena dua hal. Pertama, informasi saat itu masih simpang-siur. Kedua, secara faktual, mereka menyaksikan ada banyak orang yang memasuki kampung mereka. Sehingga mereka harus responsif. Pada prakteknya pun, istilah *lockdown* yang dipakai di spanduk-spanduk desa tidak sama dengan makna dalam protokol kesehatan versi ‘resmi’ pemerintah. Warga desa

hanya menutup akses jalanan kampung menjadi lebih sedikit, agar mudah menjaga dan mengawasi setiap orang yang keluar dan masuk.

Anehnya, respons seperti itu dinilai negatif. Padahal bukan hanya itu yang dilakukan oleh desa. Mereka menyediakan rumah-rumah karantina buat keluarga mereka yang balik ke desa. Mereka juga menyuplai bahan makanan bagi sesama. Masih bisa dicek di berbagai tautan berita, warga desa berbagi sayuran dan bahan makanan lain bagi korban terdampak Covid-19.

Di beberapa desa di Gunungkidul, Yogyakarta, bahkan melakukan gerakan yang luarbiasa. Mereka mengorganisir sumberdaya desa untuk disuplai ke Jakarta, ke warga mereka yang sedang bekerja di Jakarta. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan di Jakarta diminta jangan pulang dulu, dan diberi bantuan dari desa, sembari mereka mempersiapkan rumah karantina. Ketika orang-orang yang bekerja di kota sudah tidak punya daya tahan lagi untuk meneruskan hidup di kota, dan mereka memutuskan balik, rumah karantina sudah selesai, sistem sosial serta daya dukung warga sudah pun sudah siap.

Tentu kita semua bisa angkat topi kepada, sekali lagi, bagaimana desa-desa di Indonesia menjadi bempu kuat dalam menahan laju krisis sekaligus penyakit. Tapi dengan kejadian yang berulang seperti itu, tentu saja dengan tensi dan derajat yang berbeda, tidak kah kita perlu memikir ulang bagaimana relasi desa-kota menjadi lebih sehat lagi. Plus,

bagaimana kebijakan negara lebih adil lagi dalam melihat dan memposisikan desa?

## Desa dan Strategi Tolak Bala'

**B**agi warga desa, istilah pandemi mungkin terdengar asing. Tapi mereka terbiasa dengan ragam istilah yang menyerupai itu seperti misal pagebluk dan bala' alias bencana. Di Indonesia, juga negara lain, pandemi Covid-19 memiliki implikasi pada terjadinya krisis ekonomi alias paceklik. Tapi di desa-desa, sebetulnya istilah paceklik pangan, yang biasanya ditandai dengan berbagai gagal panen, tidak terjadi.

Di beberapa desa di Yogya, begitu terjadi indikasi krisis pangan, petani yang semula mesti mengistirahatkan dulu tanah mereka seusai panen padi, banyak yang memutuskan untuk memperpendek fase istirahat tanah, langsung berproduksi lagi. Di bulan Juni sampai November nanti, ada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi andalan petani untuk meraup banyak uang, sedang dalam masa panen yang bagus. Tiga di antaranya: kopi, cengkeh, dan tembakau.

Tapi tentu saja, imbas dari krisis ekonomi, hasil panen tersebut terancam tidak terserap oleh pasar, atau setidaknya tidak mendapatkan harga yang nisbi bagus. Harga cengkeh yang biasanya tembus 80 ribu rupiah per kilogram, sampai saat tulisan ini dibuat rata-rata belum bergerak dari kisaran

60 ribu per kg. Harga kopi kering yang masih ada kulitnya, ada di bawah harga normal yang biasanya berkisar 18 ribu sampai 22 ribu rupiah. Sepertinya harga komoditas tembakau pun bakal bernasib sama, karena industri hasil tembakau (IHT) mengalami guncangan juga, selain cukai diketok sangat mahal pada akhir tahun lalu, *demand shock* juga terjadi karena banyak orang mulai tak punya uang. Laut Indonesia masih terus menghasilkan komoditas ikan yang bagus. Tapi lagi-lagi, karena permintaan turun, harga ikan pun tidak bagus.

Sebetulnya, hal yang harus disadari bersama adalah ketika desa-desa di Indonesia sedang panen komoditas pertanian yang bagus seperti cengkeh, tembakau, kopi, kakao, vanila, dll, termasuk ikan dan komoditas laut yang lain, itu artinya adalah ada uang yang masuk cukup banyak ke desa. Uang itulah yang sesungguhnya menggerakkan roda perekonomian desa. Memang dana desa penting, tapi bukan yang utama dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Karena sudah sejak dulu, desa punya kekuatan dan kemandiriannya sendiri. Sebagai perbandingan saja, jika rerata dana desa setiap tahun adalah satu miliar rupiah, sesungguhnya itu hanya setara dengan pendapatan satu keluarga di sebuah desa di lereng Gunung Sumbing saat panen tembakau. Atau hanya setara dengan pendapatan satu keluarga petani cengkeh di Munduk, Bali Utara, saat harga cengkeh bagus. Atau kalau mau jauh lagi, hanya setara dengan pendapatan dua keluarga di daerah Gura Bunga, Tidore, saat panen cengkeh. Jika komoditas

pertanian itu kita hitung dari pola perputaran uangnya, lebih dasyat lagi, karena jejaring ekonomi dan budaya di desa itu terjaga dan sentausa.

Petani dan nelayan sebagai aktor utama yang ada di desa, menjalankan sistem kemandirian dan keberdayaan mereka, dan tidak mudah diguncang oleh pengaruh dari luar. Mereka punya sistem perekonomian yang sudah mereka jalani dan hitung sendiri. Menurut saya, petani dan nelayan adalah wirausahawan. Sebab mereka memproduksi sesuatu, punya risiko dalam pekerjaan mereka, termasuk bisa rugi. Budaya olah tanah, mensyaratkan banyak hal seperti sistem pengetahuan, kerjasama kolektif, manajemen tanam, bahkan sampai punya konsekuensi pada suplai pangan. Itu artinya, benarlah bahwa istilah bertani itu yang tepat adalah budidaya pertanian. Karena di sana tersimpan makna yang luas, tautan yang erat antara ‘budi’ alias olah pikir, dan ‘daya’ alias kemampuan rekayasa dan responsif, sehingga semua itu menjelma menjadi kebudayaan.

Gotong royong misalnya, bagi orang kota atau elite politik, mungkin slogan saja. Atau ada kata tapi tak punya korelasi dalam perilaku mereka. Bagi orang desa, tidak perlu kata gotong royong itu digembar-gemborkan, karena hal itu merupakan praktek nyata kehidupan sehari-hari. Guyub, kebersamaan, ikatan komunalitas yang masih tinggi, menjadi modal sosial yang sangat besar di desa. Bahkan, mereka, orang-orang desa, mau merawat luka dan penderitaan orang-orang kota.

Desa sudah membuktikan berkali-kali, termasuk dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini, menjadi faktor penting dan strategis. Sayang, semua itu tidak membuat kita semua lebih perhatian terhadap desa. Jika Anda menonton televisi dan liputan media lain soal Covid-19, terasa betul bahwa media pun mengalami bias kota-sentris. Benar bahwa kota adalah mula pandemi, dan benar bahwa di kotalah korban paling banyak. Tapi mereka luput melihat bagaimana desa menjadi faktor dominan dalam mengatasi pandemi ini. Coba bayangkan kalau desa-desa tidak melakukan *lockdown* kampung, bayangkan jika mereka tidak mau menerima kembali orang-orang yang tidak punya pekerjaan lagi di kota, sangat sulit membayangkan bagaimana suplai makanan untuk orang-orang kota jika desa berhenti berproduksi.

Ke depan, jika pandemi ini akan berlangsung begitu panjang, maka masa depan bangsa ini jelas ada di desa. Kalau tidak secepatnya cara pandang kita dan kebijakan pemerintah tentang desa tidak dibereskan, maka pandemi ini akan berakibat lebih parah dalam jangka waktu yang lama.

## **Berdaya, Mandiri, dan Lestari**

**I**ndustri dan skema kerja manusia modern yang ada di kota, membawa dan mempercepat proses manusia kehilangan sebagian kendali atas diri mereka sendiri. Mari kita bayangkan hal ini. Jika sebuah kota tiba-tiba digedor

oleh gempa, rumah-rumah ambrol, sistem informasi macet, infrastruktur ambruk, transportasi tak bisa bergerak, listrik padam dan tak mungkin segera dipulihkan dalam sekian minggu ke depan, apa kira-kira yang terjadi? Sebagai negara yang bertahta di atas singgasana cincin api, tentu itu bukan hal yang musykil terjadi.

Kekacauan. Rasanya itu pasti. Tapi hal yang seperti di atas dalam dua dekade ini pernah berkali-kali terjadi. Tsunami menghantam Aceh. Yogya kena lindu. Palu dihantam gempa. Saya, sekali lagi secara kebetulan merekam beberapa kiat dan siasat warga *gampong* di Aceh dalam bertahan hidup. Saya bahkan menjadi relawan selama hampir setahun saat Yogya diguncang lindu. Adat, kedekatan dengan alam, daya dukung lingkungan (dalam hal ini tentu saja pangan), sangat berperan penting dalam situasi yang sangat darurat. Belum lagi, kolektivitas dan sikap komunalisme yang masih kuat, menjadi tumpuan baik secara sosial maupun secara psikologis untuk bisa bertahan ketika kampung didera krisis yang bersifat keras dan mendadak. Dari sana, daya hidup kembali menjalar. Semua menjadi nisbi mudah untuk diperbaiki. Kehidupan dilanjutkan.

Dalam situasi yang sangat ekstrem, di luar segala rencana, niscaya desa lebih bisa bertahan dan berdaya dibanding kota jika terjadi bencana.

Menjadi kota, seolah mantra penting dalam proses pembangunan sekarang ini. Dan keputusan itu, sialnya, diputuskan oleh para elite politik dan pengambil kebijakan yang tinggal

di kota. Bias kota-sentris sangat tampak sekali. Cara pandang kota-sentris ini misalnya, bisa dengan mudah kita dapatkan, saat gunung dikeruk untuk tambang mineral. Bagi ‘orang kota’ itu hanya gunung. Gundukan tanah belaka. Tapi bagi orang desa, itu sumber hidup yang bisa membuat mereka berdaya, mandiri, dan lestari. Di sana ada ekosistem. Di sana ada tautan diri-sebagai-manusia dengan alam-yang-menghidupi. Ikatan manusia atas tanah dan air, bukan semata kalkulasi ekonomi. Kalau begitu cara menghitungnya, maka semua hal di dunia ini, baik gunung, hutan, dan laut, akan kehilangan pesonanya. Semua hanya tampak uang semata. Begitu semua itu diuangkan, kita akan kehilangan banyak hal yang lebih besar.

Saya jujur saja tidak mengerti, kenapa variabel berdaya, mandiri, dan terlebih lestari, tidak pernah menjadi pertimbangan penting dalam proses pembangunan di era kiwari ini. Tentu sekali lagi, saya tidak sedang meromantisir desa, dan menatap desa dengan rasa melankolis. Saya tahu persis, desa sebagaimana peradaban manusia, pasti mengalami dinamika. Saya juga tidak ingin menatap kota dengan rasa yang pesimistis. Tapi kota, jika disimak betul tulisan ini, selalu merujuk pada kuasa dan bagaimana kebijakan diputus dan diedarkan di seluruh negeri.

Saya bahkan tidak menolak, dan harus mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi, begitu berguna bagi desa. Banyak desa bisa langsung menjual produk khas mereka langsung ke konsumen, tanpa rantai perdagangan yang

panjang, yang acapkali merugikan para petani. Dengan internet dan sistem komunikasi, misalnya, para petani bisa langsung mengakses harga dan komoditas apa yang sedang dibutuhkan. Dengan sistem informasi, plus infrastruktur standar seperti jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh, membuat pergerakan komoditas dari desa ke kota lebih masuk akal dan ekonomis.

Tapi makin maraknya industri ekstraktif yang mengubah hutan menjadi tambang, gunung-gunung dihancurkan, laut dicemari, pulau-pulau kecil dikeruk dan dikotori, mau tidak mau rasanya wajib bagi kita semua untuk memandang lebih cemas dan kritis lagi tentang apa yang sedang berlangsung di desa-desa di seluruh Indonesia.

## Menjelang Penutup

**S**emua virolog di seluruh dunia sepakat bahwa Covid-19 terjadi karena ketidakseimbangan alam. Kita dengan mudah akan tahu, kenapa alam menjadi tidak seimbang. Sayang, dalam semua skenario mengatasi pandemi ini, kita hanya sibuk pada dua hal: pertama, bagaimana menemukan vaksin dan obat Covid-19, dan bagaimana roda perekonomian berputar lagi.

Tentu dua hal itu tidak keliru. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita menjawab akar persoalan kenapa Covid-19 muncul di muka bumi ini? Bukankah itu hal yang

sangat penting? Jika hal itu tidak diatasi, taruhlah kelak vaksin ditemukan, namun akar persoalan tidak diselesaikan, ketidakseimbangan ekologi terus terjadi, bukan tidak mungkin virus-virus yang lebih ganas dan mematikan akan bermunculan kembali?

Dari sini kemudian kita bisa mafhum, cara pandang dan model pendekatan kota-sentris kepada desa, tampaknya menjalar dari cara kita memandang dunia. Karena kita makhluk yang berpikir, maka tugas kita adalah menaklukkan dunia. Menaklukkan dalam hal ini, adalah merusaknya. Jika akar persoalan ini tidak dijawab, maka yang disebut menggerakkan roda ekonomi itu berarti mari kita keruk dan rusak lagi alam, tanpa memperhatikan kelestarian, tanpa mempertimbangkan orang-orang yang hidup di sana, dan tak perlu mengindahkan anak-cucu kita.

Kita dengan alam hanya diikat oleh satu-satunya hukum yakni hukum ekonomi, itu pun ekonomi uang sesaat. Pragmatisme ekonomi. Sistem ekonomi yang sudah pasti tidak berkelanjutan, bersifat destruktif, dan yang menjadi incaran tentu saja sebagian besar ada di wilayah desa. Di sana tersimpan minyak, gas, batubara, dan berbagai mineral.

Kita tidak sedang memikirkan sistem ekonomi yang lebih punya daya hidup, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Imajinasi kita tumpul hanya karena tidak sanggup membayangkan jika desa-desa di seluruh negeri ini berdaya, mandiri, dan lestari, maka negara ini akan kokoh, kuat, dan tahan akan guncangan. Dengan begitu, industri yang mestinya

kita bangun adalah industri yang bertumpu pada komoditas pertanian dan hasil laut. Industri yang lebih memungkinkan lebih banyak orang untuk merasa bahagia.

Dengan begitu, kita bisa mendekati desa dengan cara yang lebih arif lagi. Mantra produksi yang cepat dan massal, sudah selayaknya kita renungkan, apakah itu kompatibel dengan hukum kelestarian dan keberlanjutan. Sebab kalau cara lama terus kita pertahankan, maka dalam sekian puluh tahun ke depan, yang tersisa adalah lubang-lubang menganga di area bekas tambang, para petani yang kehilangan daya hidupnya, alam yang lelah diperas sampai tak ada lagi yang tersisa.

Ke depan, siapa yang bisa menguasai pangan, akan menguasai perekonomian. Itu bukan saya yang mengatakan. Juga bukan para romantis pencinta lingkungan. Kalimat itu diucapkan oleh Jack Ma, salah satu orang yang namanya mulai disejajarkan dengan Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Larry Page. Dan bukan tidak mungkin kita akan mengalami kesulitan pangan.

Tanda-tandanya sudah terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir pada tiga indikator pokok dan penting: semakin sempitnya lahan-lahan pertanian pangan produktif di perdesaan, terus menurunnya tingkat produktivitas per satuan luas lahan tersebut, dan kian meningkatnya jumlah dan jenis impor bahan pangan (termasuk bahan pangan pokok seperti beras).

Data resmi dari BPS memperlihatkan, selama lima tahun terakhir (2014-2019) terjadi pengurangan lahan pertanian

di perdesaan sebesar 7.7% atau sekitar 600.000 hektare. Ini termasuk penyempitan atau perubahan tata guna (fungsi) lahan pertanian pangan di beberapa daerah penghasil utama padi atau beras. Di Jawa Barat, misalnya, pada akhir 2013, luas lahan sawah padi di sana masih 925.000 hektare. Akhir 2018, sudah menyusut menjadi 911.800 hektare atau berkurang sekitar 13.225 hektare (1,43%). Di Jawa Timur, provinsi penghasil beras terbesar secara nasional,

tingkat produktivitas lahan padi sawahnya bergerak turun sampai 3,68% (dari 59,8 kuintal per hektare pada tahun 2013, menjadi hanya 57,6 kuintal per hektare pada tahun 2018). Di daerah yang mengalami kenaikan tingkat produktivitas, kenaikannya juga tidak terlalu besar, rerata di bawah 1,0%. Misalnya, Jawa Barat, mencatat tingkat produktivitas 58,8 kuintal per hektare pada tahun 2013, menjadi hanya 58,9 kuintal per hektare pada tahun 2018. Dengan kata lain, kenaikannya hanya 0,2%.

Dan, semua itu kian diperparah oleh impor bahan pangan pokok yang terus berlangsung. Sampai akhir 2019 dan awal 2020 (semester I), impor beras kita masih lebih dari 444,5 ribu ton dengan nilai AS\$ 184,2 juta (Rp 2,5 triliun)! Itu baru beras saja. Impor aneka sayuran masih 770,3 ribu ton dengan nilai AS\$ 770,1 juta (Rp 10,7 triliun). Impor daging mencapai 262,3 ribu ton dengan nilai AS\$ 829,8 juta (Rp 11,6 triliun). Impor gula lebih mencengangkan lagi, mencapai 4,09 juta ton dengan nilai AS\$ 1,3 milyar (Rp 19,1 triliun). Bahkan, garam pun masih impor, mencapai 2,5 juta ton

dengan nilai AS\$ 95,5 juta (Rp 1,3 triliun). Untuk beberapa jenis bahan pangan pokok ini saja (belum termasuk impor beberapa bahan pangan lain seperti gandum, kedelai, bawang merah dan putih, cabe, bahkan singkong), jumlahnya sudah sangat fantastis: 8,06 juta ton dengan nilai total AS\$ 3,1 milyar (Rp 44,5 triliun)!

Namun, yang paling penting, sebelum itu semua terjadi, kita sebenarnya sudah terlebih dulu kehilangan rasa hormat atas air, laut, gunung, hutan, dan pepohonan.

Seorang jurnalis penggerutu, sekaligus seorang petualang, mencoba mencari tempat-tempat yang membahagiakan di muka bumi ini. Tentu kita dengan mudah tahu, orang itu bernama Eric Weiner, yang kemudian membukukan pencarian gilanya itu dengan judul: *The Geography of Bliss* (2009). Dia mencoba menolak parameter ekonomi *Gross National Income*, dan menggantikannya dengan konsep *Gross National Happiness*. Ada satu ungkapannya yang kemudian menyentak dunia, “Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.”

*Yogya, 6 Juni 2020*